

## ANALISIS FUNGSI INTERMEDIASI DAN RISIKO KREDIT MACET (STUDI KASUS PERBANDINGAN BANK UMUM DAN BPR) DI PROVINSI BALI

Desak Ayu Sriary Bhegawati

Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar-Bali, Indonesia

[desak.bhegawati@gmail.com](mailto:desak.bhegawati@gmail.com)

Diterima: 2 Maret 2018

Direvisi: 6 Juni 2018

DiPublikasi: 30/07/2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.710.22-31>

### Abstract

The development of economy Indonesian does not get separated from the role of the government, in the financial sector institutions, and the business operators. Monetary wisdom as one part of this superior wisdom have an important role in meeting of the bank in realizing an objective of national development. Economic development in a country very much dependent on the development of dynamic and real contribution of the country banking sector. Bank is a financial institution that has a duty as an intermediary finances between the sides parties who have these surplus funds with the party who deficit of funds. Intermediation function run by banking institutions participate as an agent in the accelerated development and to increase economic growth and become better at public welfare. Naturally bank able to perform intermediation function with a deal with different types of borrowers and regulatory framework institutional and appropriate, banks have better preparations in the face of asymmetric information. Non performing loan is the ratio use for measures the bank in managing risk repayment failure by the debtor. The lower the percentage of Non Performing Loan, then the bank will experience advantage, but if the percentage of non performing loan of the increasing, the banks will be a loss. Intermediation function (Loan to Deposit Ratio) there are differences between commercial banks (Loan to Deposit Ratio) and BPR (Loan to Deposit Ratio) in Bali, this indicates of Public Credit Bank more capable of carries on the intermediation function. The Public Credit Bank better able to intermediation function. The value of Non Performing Loans to outstanding loans Commercial Bank and Public Credit Bank in Bali there was a gap in it is seen of the value Non Performing Loans to outstanding loans Public Credit Bank higher than the commercial, as by Loan to Deposit Ratio of higher Public Credit Bank than the Commercial Bank.

**Keywords :** Commercial Bank, Public Credit Bank, Loan to Deposit Ratio, and Non Performing Loans

### Abstrak

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peranan pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan, dan para pelaku usaha. Kebijaksanaan moneter sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan ekonomi makro mempunyai peranan penting di dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Bank merupakan suatu lembaga keuangan (financial institution) yang memiliki tugas sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak - pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). Fungsi intermediasi yang dijalankan oleh lembaga perbankan berperan serta sebagai agen dalam proses percepatan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat. Secara alami bank mampu melakukan fungsi intermediasinya dengan melakukan kesepakatan dengan berbagai tipe peminjam dan dengan kerangka aturan serta kelembagaan yang sesuai, bank memiliki persiapan yang lebih baik dalam menghadapi asymmetric information. Non Performing Loan merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Semakin rendah persentase Non Performing Loan, maka bank tersebut akan mengalami keuntungan, tetapi jika justru sebaliknya persentase Non Performing Loan yang semakin tinggi, maka bank tersebut akan mengalami kerugian. Fungsi intermediasi LDR terdapat perbedaan antara LDR Bank Umum dan BPR di Bali, Hal ini mengindikasikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lebih mampu menjalankan fungsi intermediasinya. Nilai NPL Bank Umum dan BPR di Bali terdapat perbedaan hal ini dilihat dari nilai NPL BPR lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum, karena dengan LDR dari BPR yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum.

**Kata Kunci :** Bank Umum, BPR, Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Non Performing Loans (NPL)

### I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peranan pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan, dan para pelaku usaha. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pembuat dan penetap

kebijakan diharapkan mampu memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (Andang, 2007). Kebijaksanaan moneter sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan ekonomi makro mempunyai peranan penting di dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sasaran akhir dari kebijaksanaan moneter

juga merupakan sasaran pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan termasuk pemerataan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi serta kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran Indonesia. Mengingat perekonomian Indonesia di tahun-tahun mendatang masih akan menghadapi tantangan, maka dalam perspektif jangka panjang diperlukan penyempurnaan di berbagai bidang termasuk penyempurnaan di bidang moneter dan perbankan. Peranan bank sentral didalam pembinaan perbankan perlu terus ditingkatkan agar tercipta suatu sistem finansial yang sehat dan terkoordinasi.

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula sebaliknya, ketika sektor perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan ikut terkena dampak sehingga fungsi intermediasi tidak berjalan normal (Kiryanto, 2007). Bank merupakan suatu lembaga keuangan (financial institution) yang memiliki tugas sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak - pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang kekurangan dana (deficit unit) (Agus, 2003).

Fungsi intermediasi yang dijalankan oleh lembaga perbankan berperan serta sebagai agen dalam proses percepatan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan (perbankan) menyediakan sumber - sumber dana dalam bentuk penyaluran kredit yang di gunakan untuk pembiayaan modal kerja, konsumsi, dan investasi di sektor swasta (Anindita,2011). Secara alami bank mampu melakukan fungsi intermediasinya dengan melakukan kesepakatan dengan berbagai tipe peminjam dan dengan kerangka aturan serta kelembagaan yang sesuai, bank memiliki persiapan yang lebih baik dalam menghadapi asymmetric information.

Penyaluran kredit merupakan fungsi utama dari bank dan merupakan sumber pendapatan yang utama pada umumnya. Pendapatan ini diperoleh dari *Spread* suku bunga simpanan dan kredit yang dikenakan oleh bank. *Spread* atau *net margin* akan menentukan *net income* dari bank. Penentuan *Spread* ini tergantung dari pihak bank dan bagaimana target marketnya (Kurniawan:2004). Dalam praktek perbankan di Indonesia eksekutif bank menetapkan *spread* sebesar 2 persen sampai dengan 3 persen yang merupakan harga yang layak atau cukup sebagai komponen *lending rate*.

Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan investasi di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan. Dengan demikian wajar lambatnya penyaluran kredit di

Indonesia setelah krisis 1997 dituding sebagai salah satu penyebab lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia dibandingkan negara Asia lainnya yang terkena krisis (Korea Selatan dan Thailand). Kritik pedas terhadap intermediasi perbankan muncul ditengah-tengah turunnya suku bunga SBI yang telah berlangsung dalam beberapa waktu namun tidak diikuti oleh penurunan suku bunga kredit secara signifikan.

Sesuai dengan kebijakan otoritas moneter, bank-bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pergerakan perekonomian Bali melalui pengucuran kredit investasi untuk untuk mendanai pembangunan daerah. Melalui pengawasan terhadap Bank Umum (BU) dan BPR sebagai pelaksana system keuangan moneter, bank sentral memiliki tugas menjaga agar sistem moneter berfungsi dengan baik, sehingga tingkat pertumbuhan kredit atau uang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi (Nopirin,2010).

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

Apakah terdapat perbedaan Fungsi Intermediasi (LDR) Bank Umum dengan BPR di Bali?

Apakah terdapat perbedaan resiko Kredit Macet (NPL) Bank Umum dengan BPR di Bali?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### *Tinjauan Teori Bank*

#### *A. Pengertian Bank*

Dalam UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan , sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 tahun 1998, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Santoso (1996) Bank dinyatakan sebagai suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha pokok bank adalah : Menghimpun dana dari pihak ketiga, dalam hal ini masyarakat, Menjadi perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit, memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

#### *B. Jenis dan Usaha Bank*

Pada pasal 5 UU No. 10 tahun 1998 dicantumkan ada 2 (bank) jenis bank, yaitu :

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Bank Umum dapat pula :

Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan usaha yang diijinkan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), seperti yang tercantum dalam pasal 13 UU No.10 Tahun 1998 meliputi :

Menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Memberikan kredit kepada masyarakat untuk kesejahteraan.

Menyediakan pembiayaan baginasabah berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain.

Sejarah lembaga perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang rentenir yang memberikan kredit dengan bunga tinggi (www.bi.go.id, Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat Indonesia,2006:1). Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970an, Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat ” atau BPR. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tentang Perbankan tahun 1992 (UU No.7/1992 tentang Perbankan), BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum. Sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank. Selain itu, dinyatakan juga bahwa

lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN (Lumbung Pith Nagari), LPD (Lembaga Perkreditan Desa), BKD (Badan Kredit Desa), BKK (Badan Kredit Kecamatan), KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil), LPK (Lembaga Perkreditan Kecamatan), BKPD (Bank Karya Produksi Desa), dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Selanjutnya PP No.71/1992 memberikan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997 bagi lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk memenuhi persyaratan menjadi BPR. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, tidak seluruh lembaga keuangan tersebut dapat dikukuhkan sebagai BPR karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. BPR yang didirikan sesudah PAKTO 1988 maupun Lembaga Keuangan yang dikukuhkan menjadi BPR sesuai dengan PP No.71/1992, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. Khusus Badan Kredit Desa (BKD), meskipun lembaga tersebut sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, diberikan status sebagai BPR, namun karena organisasi dan manajemennya relatif sederhana, lingkup usahanya sangat kecil, serta operasionalnya tidak setiap hari, maka pengaturan dan pengawasan terhadap BKD pun tidak dapat disamakan dengan BPR. Sampai dengan akhir Juli 2006 terdapat 5.345 BKD yang tersebar di pulau Jawa dan Madura, namun dari jumlah tersebut sebanyak 863 diantaranya tidak melakukan kegiatan (non aktif). Dengan mempertimbangkan karakteristik yang spesifik, jumlah dan sebarannya serta secara historis sebelum PAKTO 1988 pengawasan BKD dibawah kewenangan BRI maka pengawasan BKD dilakukan oleh BRI untuk dan atas nama Bank Indonesia. Pada akhir bulan Juli 2006 jumlah BPR mencapai 1.935 terdiri dari BPR yang didirikan setelah PAKTO 1988 sebanyak 1.277 (66 persen), dan Bank Pasar atau Bank Desa, BKPD dan bank milik Pemerintah Daerah lainnya yang telah beroperasi sebelum PAKTO 1988 sebanyak 658 (34

persen).

Loan to deposit ratio (LDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang di berikan di dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2004). Ketentuan Bank Indonesia tentang LDR yaitu berada di antara rasio 85% - 100%. Dendawijaya (2005) menyatakan bahwa salah satu ketentuan perbankan yang sangat berpengaruh terhadap keberanian para eksekutif perbankan untuk memperbesar volume kreditnya dalam rangka mengejar profitabilitas yang tinggi adalah LDR. sebagai tolak ukur bank untuk memperbesar volume kredit untuk mencapai profit yang tinggi. Nilai *loan to deposit ratio* (LDR) merupakan angka yang dapat digunakan untuk melihat berjalan tidaknya fungsi intermediasi bagi sektor perbankan, yaitu untuk menyalurkan kembali dana masyarakat yang dihimpun ke dalam bentuk kredit. Nilai LDR (*loan to deposit ratio*) dapat diperoleh dengan rumus (Manurung, 2004) sebagai berikut :

### Total Kredit

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total DPK}}{\text{Total DPK}} \times 100 \%$$

Loan to Deposit Ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank (Agustiningrum 2013 dalam Sofia, 2014). Menurut Sofia (2014) semakin tinggi Loan to Deposit Ratio maka profitabilitas perbankan akan meningkat dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit secara efektif.

### **Non Performing Loans (NPL)**

Tingkat pengumpulan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas, termasuk pokok cicilan dan bunganya disebut dengan kolektibilitas. Kriteria penggolongan kolektibilitas kredit dapat dikelompokkan dalam kriteria lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, yang kemudian menjadi piranti dari Non Performing Loans sebuah lembaga perbankan. Dengan kata lain yang dimaksud dengan Non Performing Loans atau disingkat NPLs menurut Bank Indonesia (2005) adalah kredit dalam kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Perhitungan NPLs menurut Bank Indonesia dibedakan menjadi NPL gross dan net. Berdasarkan jenis penggunaan kredit, NPLs dapat dibedakan menjadi NPLs kredit investasi, NPLs kredit Modal Kerja, dan NPLs kredit konsumsi.

Terdapat beberapa kriteria yang menunjukkan mengapa suatu kredit dikatakan berada dalam kualitas tersebut diatas. Menurut Sudirman (1996:66) kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

Terdapat tunggakan bunga angsuran dari masa angsuran yang telah ditetapkan (untuk kredit dengan

angsuran diluar KPR).

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum 9 bulan (untuk kredit dengan angsuran untuk KPR).

Untuk kredit tanpa angsuran dikatakan kurang lancar bila terdapat tunggakan bunga melampaui batas waktu untuk kredit yang belum jatuh tempo, atau kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan.

Kredit tergolong diragukan jika kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar diatas tetapi berdasarkan penilaian disimpulkan bahwa:

Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 persen dari hutang peminjam, termasuk bunganya.

Kredit tak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 persen dari hutang peminjam.

Sementara kredit dikatagorikan macet jika:

Tidak memenuhi kriteria-kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan seperti tersebut diatas.

Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha menyelamatkan kredit.

Kredit tersebut penyelesaiannya diserahkan pada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Non Performing Loan merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengkonversikan resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Darmawan,2004). Semakin rendah persentase Non Performing Loan, maka bank tersebut akan mengalami keuntungan, tetapi jika justru sebaliknya persentase Non Performing Loan yang semakin tinggi, maka bank tersebut akan mengalami kerugian. Bertambahnya biaya yang digunakan dalam pengelolaan kredit bermasalah akibat Non Performing Loan yang meningkat akan menyebabkan produktivitas bank menurun (Berger dan Mester,2003). Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Atmaja (2014) dan Septiarini (2014) yang memperoleh hasil NPL secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Non Performing Loan yang tinggi akan mengakibatkan kerugian pada bank, seperti tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan dan pendapatan bunga yang harusnya diterima. Sehingga bank kehilangan kesempatan mendapatkan bunga, tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta tidak dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan dan berakibat penurunan pendapatan secara total. Meningkatnya Non

Performing Loan, akan membuat bank tidak berani meningkatkan kapasitas penyaluran kreditnya, apalagi DPK tidak dicapai secara optimal, sehingga mengganggu likuiditas bank. Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiasari (2015) yang menyatakan NPL berpengaruh negatif terhadap hubungan antara LDR dengan profitabilitas. Semakin tinggi persentase Non Performing Loan, akan menyebabkan jumlah modal yang dimiliki oleh suatu bank akan berkurang. Hal ini terjadi karena pendapatan yang seharusnya diterima oleh bank menjadi modal yang digunakan untuk menutupi tingginya Non Performing Loan, sehingga akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut akan semakin berkurang. Maka dari itu, NPL yang tinggi akan mengakibatkan berkurangnya profitabilitas, karena pendapatan bunga yang seharusnya diterima menjadi berkurang.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Lokasi dan Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada lembaga perbankan di Bali, karena kondisi perbankan di Bali mempunyai peranan yang penting khususnya pembangunan daerah Bali, khususnya dalam penyediaan dana yang diperlukan. Obyek dalam penelitian ini adalah lembaga perbankan di Bali yaitu Bank Umum, dan BPR.

#### **Identifikasi Variabel**

Untuk menganalisis data dan menguji hipotesis penelitian perlu diidentifikasi variabel-variabel yang akan dipergunakan dalam model penelitian ini. Secara garis besar variabel yang dianalisis adalah nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Bank Umum dan BPR di Bali serta nilai Non Performing Loans (NPL) pada Bank Umum dan BPR di Bali.

#### **Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional diperlukan untuk memperjelas arti dan pemahaman tentang variabel-variabel yang dijelaskan dalam identifikasi variabel. Definisi operasional variabel yang dimaksud pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum adalah rasio jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah dana yang dihimpun Bank Umum di Bali periode triwulan I 2005 s/d triwulan IV 2017 yang dinyatakan dalam satuan persen.

Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR adalah rasio jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah dana yang dihimpun BPR di Bali periode triwulan I 2005 s/d triwulan IV 2017 yang dinyatakan dalam satuan persen.

Rasio Non Performing Loans (NPL) Bank Umum adalah persentase kredit dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet secara keseluruhan Bank Umum

di Bali periode triwulan I 2005 s/d triwulan IV 2017 yang dinyatakan dalam satuan persen.

Rasio Non Performing Loans (NPL) BPR adalah persentase kredit dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet secara keseluruhan BPR di Bali periode triwulan I 2005 s/d triwulan IV 2017 yang dinyatakan dalam satuan persen.

#### **Jenis dan Sumber Data**

##### **A. Jenis Data menurut Sifatnya**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2007). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Bank Umum dan BPR di Bali serta nilai Non Performing Loans (NPL) pada Bank Umum dan BPR di Bali.

##### **B. Jenis Data menurut Sumbernya**

Data dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari pihak lain atau orang lain berupa data sekunder yang terpublikasi dari Bank Indonesia yaitu Kajian Ekonomi Regional Bali Periode periode triwulan I 2005 s/d triwulan IV 2017.

##### **C. Metode Pengumpulan Data**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu melalui pencatatan berbagai dokumen yang Bank Indonesia yaitu Kajian Ekonomi Regional Bali Periode periode triwulan I 2005 s/d triwulan IV 2017.

#### **Teknik Analisis Data**

##### **A. Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terganggu dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah One Sample Kolmogorov-Sminov Test. (Ghozali, 2012). Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dari One Sample Kolmogorov-Sminov Test > 0,05.

##### **B. Uji Mann-Whitney dan Uji Beda Dua Rata-Rata**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengujian Mann-Whitney, menurut Siegel, Sidney (1986) mengemukakan bahwa jika tercapai setidaknya-tidaknya pengukuran ordinal. Pengujian Mann-Whitney digunakan untuk menguji apakah dua kelompok independen telah ditarik dari populasi yang sama. Uji Mann-Whitney dikembangkan oleh Henry Mann dan Donald Ransom. Uji Mann-Whitney merupakan uji nonparametrik yang digunakan untuk menguji apakah dua buah sampel independen berasal dari populasi yang sama. Populasi dari sampel pertama berbeda dengan populasi dari sampel kedua sehingga kedua

sampel tersebut bersifat independen Whitney (1947). Melakukan uji statistik untuk membuktikan hipotesis dengan syarat atau kondisi. Jika sampel lebih dari 30 menggunakan uji beda dua rata-rata independen atau independent t-test for two sample means, dengan asumsi bahwa distribusi data normal, jika distribusi data tidak normal, maka akan menggunakan uji Mann-Whitney.

**IV.HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Hasil Uji Normalitas data untuk LDR Bank Umum dan BPR adalah berdistribusi tidak normal yaitu nilai Asymp Sig (2-tailed) baik pada LDR Bank Umum maupun LDR BPR berada dibawah signifikansi 0,05 yaitu 0,005 (LDR Bank Umum) dan 0,000 (LDR BPR)

sehingga data LDR Bank Umum dan LDR BPR berdistribusi tidak normal. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan, oleh karena data berdistribusi tidak normal yaitu menggunakan uji statistik non parametrik test dengan uji Mann-Whitney. Hasil Uji Normalitas data untuk NPL Bank Umum dan BPR adalah berdistribusi normal yaitu nilai Asymp Sig (2-tailed) baik pada NPL Bank Umum maupun NPL BPR berada diatas signifikansi 0,05 yaitu 0,200 (NPL Bank Umum) dan 0,088 (NPL BPR) sehingga data NPL Bank Umum dan NPL BPR berdistribusi normal. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan, oleh karena data berdistribusi tidak normal yaitu menggunakan uji statistik parametrik test yaitu dengan uji beda dua rata-rata. Hasil Uji normalitas data pada tabel dibawah ini.

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		LDR BANK UMUM	LDR BPR
N		52	52
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	68.0913	88.6008
	Std. Deviation	11.60148	16.56126
Most Extreme Differences	Absolute	.151	.356
	Positive	.151	.356
	Negative	-.124	-.166
Test Statistic		.151	.356
Asymp. Sig. (2-tailed)		.005 <sup>c</sup>	.000 <sup>c</sup>

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		NPL BANK UMUM	NPL BPR
N		52	52
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	2.3194	4.7733
	Std. Deviation	1.18974	1.80394
Most Extreme Differences	Absolute	.077	.114
	Positive	.077	.114
	Negative	-.071	-.109
Test Statistic		.077	.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>	.088 <sup>c</sup>

Hasil Pengujian LDR Bank Umum dengan LDR BPR dengan menggunakan Uji Mann Whitney yaitu nilai Asymp Sig (2-tailed) 0,00 lebih kecil dari signifikansi 0,05, Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan fungsi intermediasi (LDR) antara Bank Umum dengan BPR di Bali. Fungsi Intermediasi (LDR) merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. LDR paling sering digunakan oleh analis keuangan dalam menilai suatu kinerja bank terutama dari seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. Alasan memilih variabel ini adalah dengan pertimbangan bahwa semakin besar jumlah kredit yang diberikan oleh bank maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank yang bersangkutan, namun dilain pihak semakin besar jumlah kredit yang diberikan diharapkan bank akan mendapatkan return yang tinggi pula. Hal tersebut akan mempengaruhi penilaian investor dalam mengambil keputusan investasinya sehingga secara bersamaan akan mempengaruhi permintaan dan penawaran saham di pasar modal yang pada akhirnya mempengaruhi harga saham yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan tingkat return saham bank.

LDR Bank Perkreditan Rakyat (BPR) walaupun berfluktuasai namun selalu berada diatas 70 persen, bahkan dalam beberapa periode melampaui nilai ideal yang diisyaratkan Bank Indonesia (85 persen-100 persen). Hal ini mengindikasikan Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) lebih mampu menjalankan fungsi intermediasinya, bahkan fungsi intermediasi yang dijalankan oleh BPR tidak banyak mengalami gangguan yang berarti walaupun krisis global, termasuk Bali. Nilai LDR yang tinggi juga menunjukkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cenderung kurang berhati-hati di dalam menjalankan fungsi utamanya tersebut. LDR yang tinggi bisa pula diakibatkan oleh terbatasnya sumber dana pihak ketiga yang dimiliki oleh BPR untuk disalurkan kembali, sedangkan permintaan kredit yang cukup tinggi karena prosedurnya yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum. Akibatnya seluruh DPK (Dana Pihak Ketiga) disalurkan kembali dalam bentuk kredit, tanpa memperhatikan posisi likuiditasnya. Namun demikian, kelebihan oleh BPR dibandingkan dengan bank umum adalah kemampuan mereka untuk mengenali dengan jelas karakteristik nasabah dan debitur mereka. BPR memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai debitur yang akan diberikan pinjaman karena letak atau lokasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan sistem operasionalnya yang lebih “merakyat”.

Tingginya Rasio LDR BPR tersebut menunjukkan bahwa penyaluran kredit dilakukan tidak hanya dari penghimpun dana tetapi juga dari modal bank, kondisi tersebut akan meningkatkan rasio likuiditas bagi bank. Peningkatan penyaluran kredit ini antara lain didorong oleh *linkage program* antara bank umum dan BPR serta sudah beroperasinya Lembaga Dana Apex (LDA Apex) yang berperan di dalam membantu BPR yang anggotanya mengalami *liquidity mismatch*.

#### Mann-Whitney Test Ranks

	GROUP LDR	N	Mean Rank	Sum of Ranks
LDR	1.00	52	35.85	1864.00
	2.00	52	69.15	3596.00
	Total	104		

#### Test Statistics<sup>a</sup>

	LDR
Mann-Whitney U	486.000
Wilcoxon W	1864.000
Z	-5.630
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000
a. Grouping Variable: GROUP LDR	

Non Performing Loan (NPL) merupakan ukuran risiko kredit yang menjadi parameter tingkat kesehatan bank. Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) secara neto lebih dari 5% dari total kredit. Jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank tersebut. Semakin besar tingkat NPL maka bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL (Riyadi, 2006). Meskipun rata-rata rasio NPL tidak melebihi angka 5% pada Bank Umum, tetapi nilainya relatif berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa NPL rentan sekali mengalami perubahan yang tidak terduga. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang tepat dalam mengendalikan rasio NPL agar kinerja Bank Umum yang go public jauh lebih baik sehingga mendorong investor tertarik untuk berinvestasi dengan nilai rata-rata NPL Bank Umum yang Go Public.

Hasil pengujian dengan uji beda dua rata-rata dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara NPL Bank

Umum dan NPL BPR di Bali, hal ini dilihat dari nilai yaitu nilai Asymp Sig (2-tailed) 0,00 lebih kecil dari signifikansi 0,05. Risiko kredit macet NPL yang dihadapi BPR lebih besar dibandingkan Bank Umum, hal ini dapat dilihat dari profesionalisme kinerja BPR dibandingkan Bank Umum seperti : produk gagal yang ditawarkan kepada nasabah, pinjaman berdasarkan kekuatan neraca bukan berdasarkan pinjaman arus kas, bank mengambil terlalu banyak kenyamanan dalam keamanan, asimetri informasi, lingkungan ekonomi dan pengaruh politik

Fluktuasi nilai NPL diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen perbankan baik Bank Umum maupun BPR sehingga dapat menekan tingginya NPL untuk periode berikutnya, terutama pada kondisi-kondisi krisis ekonomi. Dengan mengetahui rasio NPL suatu bank, masyarakat dan Bank Indonesia dapat mengambil langkah yang bijak dalam menyikapi dan menghadapi bank tersebut. Peningkatan atau penurunan rasio NPL pada suatu bank dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal bank, maupun secara makro.

**T-Test  
Group Statistics**

	GROUP NPL	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
NPL	1.00	52	2.3194	1.18974	.16499
	2.00	52	4.7733	1.80394	.25016

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means			
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Upper
NPL	Equal variances assumed	17.642	.000	-8.189	102	.000	-1.85945
	Equal variances not assumed			-8.189	88.309	.000	-1.85835

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dilihat dari fungsi intermediasi LDR terdapat perbedaan antara LDR Bank Umum dan BPR di Bali, Hal ini mengindikasikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lebih mampu menjalankan fungsi intermediasinya, bahkan fungsi intermediasi yang dijalankan oleh BPR tidak banyak mengalami

gangguan yang berarti walaupun krisis global, termasuk Bali. Nilai LDR yang tinggi juga menunjukkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) cenderung kurang berhati-hati di dalam menjalankan fungsi utamanya tersebut dibandingkan dengan Bank Umum di Bali yang lebih berprinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit dibandingkan dengan BPR. Nilai NPL Bank Umum dan BPR di Bali terdapat perbedaan hal ini dilihat dari nilai NPL BPR lebih

tinggi dibandingkan dengan Bank Umum, karena dengan LDR dari BPR yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum maka cenderung BPR lebih kurang berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah sehingga cenderung NPL BPR lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum.

### Saran

Diperlukan kerjasama yang lebih baik antara bank umum dan BPR dalam menjalankan fungsi utama mereka sebagai perantara keuangan (financial intermediary) agar BPR dapat menutupi kekurangan dalam mengakses dana untuk menjalankan usaha mereka, sehingga fungsi intermediasi Bank Umum maupun BPR bisa berada diatas ketentuan. Selain kerjasama yang lebih baik antara bank umum dan BPR di Bali dalam fungsi intermediasi (LDR), harus bekerja sama untuk memperkecil NPL atau mengurangi risiko kredit macet demi kelancaran operasional Bank. Kepercayaan nasabah agar selalu dijaga, karena merupakan faktor utama yang menentukan kelanjutan usaha perbankan, maka bank harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, salah satu caranya adalah dengan menjaga tingkat likuiditasnya tetap berada pada batas yang ditentukan oleh pemerintah dengan pengelolaan yang baik. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, lebih mengefektifkan pengawasannya agar bank-bank yang ada di Indonesia baik Bank Umum maupun BPR di Bali dapat berkompetisi secara sehat dan tetap menjaga tingkat kesehatan Bank.

### Daftar Pustaka

- Agus, S. 2003. *Manajemen Keuangan*, Teori dan Aplikasi. BPFE. Yogyakarta
- Aini, Anindita Nur. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Untuk Membayar pajak di Kabupaten Bora. Surakarta. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Ali, Mashud. 2004. *Asset Liability Management*, Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo Kelompok Gramedia.
- Andang Setyobudi, 2007. Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007.
- Bank Indonesia.2012. Laporan Perbankan Indonesia (2012).
- Bank Indonesia.2013. Laporan Perbankan Indonesia (2013).
- Bank Indonesia.2012. Kajian Stabilitas Sistem Keuangan (KSK) No. 18,Maret 2012
- Bank Indonesia.2005. Kajian Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan IV 2005. Denpasar.
- Bank Indonesia.2006. Kajian Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2006. Denpasar.
- Bank Indonesia. 2007. Kajian Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2007. Denpasar.
- Bank Indonesia. 2008. Kajian Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2008. Denpasar.
- Bank Indonesia. 2009. Kajian Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2009. Denpasar.
- Bank Indonesia. 2010. Kajian Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2010. Denpasar.
- Bank Indonesia. 2011. Kajian Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2011. Denpasar.
- Bank Indonesia. 2012. Kajian Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2012. Denpasar.
- Bank Indonesia. 2013. Kajian Perkembangan *Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2013*. Denpasar.
- Bank Indonesia. 2014. Kajian Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2014. Denpasar.
- Bank Indonesia. 2015. Kajian Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2015. Denpasar.
- Bank Indonesia. 2016. Kajian Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2016. Denpasar.
- Bank Indonesia. 2017. Kajian Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2017. Denpasar.
- Bank Indonesia. 2018. Kajian Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2018. Denpasar.
- Bank Indonesia, Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia 2004 (SE BI No.6/23/DNDP Tanggal 31 Mei 2004).
- Berger, A.N dan Mester, L.J.1997."Inside the black box : What explains *differences in the efficiency of financial institutions*" Journal of Banking and Finance, 21, 895-947
- Berger, Allen N. & DeYoung, Robert, 2006. *Technological Progress and the Geografic Expansion of the Banking Industry*, Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing. Vol. 38(6), pages 1483-1513, September.
- Darmawan, Komang .2004. Analisis Rasio – Rasio Bank. Info Bank, Juli, 18 -21
- Dendawijaya, L. 2005. *Manajemen Perbankan*. Edisi ke-2. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika dasar*. Jakarta : Erlangga
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Iswardono. 1994. *Uang dan Bank*, Edisi Empat. Yogyakarta : BPFE
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*.PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir.2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kiryanto, Ryan, 2007, "Konsolidasi *Perbankan Nasional Menuju Best Prctice*", Makalah Seminar, Jakarta
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta
- Negara, I Putu Agus Atmaja. 2014. Pengaruh Capital Adequacy Ratio, *Penyaluran Kredit dan Non Performing Loan Pada Profitabilitas*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

- Nopirin. 1990. *Ekonomi Moneter*, edisi tiga. Yogyakarta : BPFE
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter*. Buku II. Edisi kesatu. Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta: BPFE UGM
- Saiful Bachri. 2013. *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Syariah*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Santoso, S. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT Elex Komputindo. Jakarta.
- Siamat, Dahlan. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: FE UI
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter, dan Perbankan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Septiarini, Ni Luh Sri. 2014. *Pengaruh Kecukupan Modal dan Rasio Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas dengan Moderasi Rasio Kredit Bermasalah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Slamet Riyadi. 2006. *Banking Asset and Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sofia Prima Dewi. 2014. *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta.
- Suardita, I Wayan. 2015. *Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Pada Profitabilitas Dengan Pemoderasi Risiko Kredit*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Sudirman, I Wayan. 1996. *Manajemen Perbankan. Teori, Kebijakan dan Terapan*. Badan Usaha FE UNUD. Denpasar.
- Sudirman, I Wayan. 2003. "Faktor-Faktor Penghambat Peningkatan Loan To Deposit Ratio." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 18, No. 1, Hal: 21-36.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV
- Suhardjono, Mudrajad Kuncoro. 2002. *Manajemen Perbankan Theory dan Aplikasi*. Penerbit BPFE. Jakarta.
- Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank dan Peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- Taufik, Kurniawan. 2004. *Determinan Tingkat Suku Bunga Pinjaman di Indonesia Tahun 1983-2002*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Desember 2004.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Widiasari, Ni Kadek Yuni. 2015. *Pengaruh Loan to Deposit Ratio Pada Profitabilitas Dengan Non Performing Loan Sebagai Pemoderasi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar.